

Majelis Ulama Indonesia: antara umat dan pemerintah (1957-1998)

Arif Rahim, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96915&lokasi=lokal>

Abstrak

Dinamika sejarah koniemporer Indonesia diwamai oleh pergumulan antara umat Islam dan pemerintah. Yang disebut pertama memandang agama (Islam) sebagai cam hidup, dan menginginkan ierwujudnya masyarakat bangsa yang bercorak Islami. Sedangkan yang terakhir, lebih didasari oleh pemikiran yang bercorak sekuler, msmandang agama dalam ani sempit serta lebih rnengedepankan dalil-dalil pcmbangunan pcrsanxan bangsa, dan siahilitas nasional. Pembentukan MUI (1975) merupakan hasil kesepakatan antara umat dan pemeriniah yang dimaksudkan untuk menjembatani kcpentingan kedua pihak.

Dengan demikian, MUI memiliki iimgsi yang sangat strategis.

Penelinan ini dipandang peniing artinya karena sejauh ini belum ada peneljtian uyang mengkaji tentang peranan MUI dengan menyerotinya dari sudut perpektif konilik umat dan pemerimah. Petmasalahan pokok yang akan dicari jawabannya lewat studi ini adalah: Perrama, bagaimana peranan MUI dalam dinamika konflik antara urnat dan pcmerintah ? Kedua, sebempa jauh MUI mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang disandangnya. Guna mendapatkan pemahaman yang baik tentang pennasalahan ini digunakan teori hubungan otontas dan konflik sosial sebagaimana yang dikemukakan olch Ralf Dahrendorf. Sesuai dengan rnetode yang berlaku dalam penelitian sejarah, peneliian ini menempuh langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan Data-dam yang digunakan terdiri dan data primer dan sekunder. Data primer meliputi arsip, koran dan maja\ah SCZNDBII. Sedangknn data SBkundCT ierdili dari bukn-buku dan artikel.

Peranan MUI dapat dilihat dari realisasi program keljanya yang meliputiu bcnnacam-macam aspek. Secara garis besar aspek-Wk tersebut digolongkan kepada dua hal pokok yaitu: masalah pernbinan umat dan masalah pembangiman nasional. Ditinjau dari sifat kegiannya dapat pula dikelompokkan atas dna kategori yakni: yang bersifat dakwah bil lisan (perbuatan lisan), dan bersifat dakwah bil hal (perbuaxan nyata). Dakwah bil lisan meliputi kegiatamkegiatan yang bersifat pemberian fatwa, nasehat, atau kontribusi pemikimn yang dipandang penting untuk djsampaikan pada pemedntnh maupun umat_ Dakwah bil hal melipnti kegiaian-kegiatan yang bersifat operasional yang ditujukan untnk meningkatkan kualitas dan sumber daya umat sekaligus mcrcnbantu pcmeriniah dalam menjalankan pembangunan.

Sepanjang kurun waktu 1975» 1998, MUI telah dipimpin oleh 'Liga orang ketua umum, yaitu Proi Dr. Hamka (1975-1981), KH. Syukri Gozali (1981-

1985), dan KH. Hasan Basri (1985-1998). Pada masa Hamka MUI dihadapkan pada masalah masih tegangnya hubungan antara umat dan pemelina. Persoalan-persoalan yang menonjol yang tampil ke permukaan adalah: (1) masalah pemilu 1977, (2) masalah penyiaran agama, (3) kasus Sawito Kartowibowo, (4) masalah aliran keagamaan, (5) masalah penghapusan liburn pada bulan puasa, (6) peristiwa pembajakan pesawat Garuda, dan (7) masalah fatwa hari Natal. Hubungan MUI dan pemerintah terasa dekad dalam poin (1) dan (2), dan terlihat renggang pada poin (3), (4), (5), (6) dan (7). Peranan yang dimainkan oleh MUI pada masa Hamka adalah

bersifat independen, dalam artian berbagai keputusan yang dikeluarkan MUI lebih mandiri dan semata-mata didasarkan pada fungsi-fungsi yang disandanginya.

Corak independen MUI kadang kala telah menyebabkan ketidakpuasan pemerintah terhadap MUI, namun sebaliknya, disenangi oleh umat. Kendatipun sifat kegiatan MUI pada masa ini lebih bersifat dakwah bil lisan dan tidak semuanya berhasil mencapai sasaran, banyak yang memandang MUI cukup berhasil.

Pada masa pasca Hamka yang dijalankan lebih bersifat akomodatif. Persoalan-persoalan yang menonjol yang berpengaruh terhadap pola hubungan umat dan pemerintah pada masa ini cukup banyak di antaranya: (1) pemilu 1982, (2) larangan berjilbab, (3) Keluarga Berencana, (4) penerapan asas tunggal Pancasila, (5) masalah Porkas, (6) kasus lemak babi, dan lain-lain. Dalam menghadapi persoalan-persoalan sensitif tersebut MUI cenderung bersikap lembut terhadap pemerintah sambil berupaya mengelola program lain yang bersifat netral dalam arti tidak mengandung konflik. Cukup banyak program MUI yang membawa hasil pada periode ini. Banyak kebijakan pemerintah yang ditentang oleh MUI berhasil dicabut. Selain itu., banyak program MUI yang semula tidak disukai oleh pemerintah akhirnya dibolehkan. Namun demikian, semua keberhasilan MUI pada periode ini cenderung kurang dihargai umat. Hal ini tampaknya disebabkan oleh sikap akomodatif MUI terhadap pemerintah yang diartikan umat sebagai sikap lemah, sekaligus refleksi keberpihakan MUI terhadap pemerintah.

Jika peranan MUI dilihat dari kaca mata objektif memang cukup banyak sudah program-program MUI yang bermanfaat telah berhasil disumbangkan baik kepada umat maupun kepada pemerintah. Namun dari sudut konflik kepentingan keberhasilan itu masih belum mampu merubah keadaan, masih berat sebelah, dalam artian pemerintah masih tetap berada pada pihak yang diuntungkan dibanding apa yang didapat oleh umat. Apalagi jika yang didapatkan oleh umat tersebut dipatokkan pada cita-cita umat yang menginginkan terwujudnya masyarakat bangsa yang Islami, semua keberhasilan ini masih jauh dari apa yang diharapkan.